

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
BELANJA PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

NAMIRA SALSABILLA

1802110134



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NAMIRA SALSABILLA
NPM : 1802110134

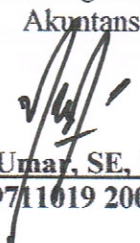
Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN
ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KESEHATAN
HEWAN DAN PETERNAKAN PROVINSI
ACEH TAHUN ANGGARAN
2017-2020**

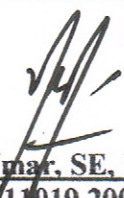
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

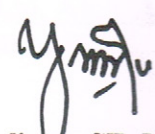
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing II


Yusliana, SE, M.Si
NIK. 19650310 200410 2 001

Mengetahui,
Dekan,


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NAMIRA SALSABILLA
NPM : 1802110134

Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN
ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KESEHATAN
HEWAN DAN PETERNAKAN PROVINSI
ACEH TAHUN ANGGARAN
2017-2020**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 27 Januari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Anggota

Yusliana, SE, M.Si
NIK. 19650310 200410 2 001

Sekretaris

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Maidar, SE, M.Si.
NIK. 19801231 200802 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 01 Februari 2022

Yang Menyatakan



NAMIRA SALSABILLA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Namira Salsabilla
NPM : 1802110134
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Februari 2022

Banda Aceh, 01 Februari 2022
Yang Menyatakan



NAMIRA SALSABILLA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat, hidayah, berkah dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017-2020”**. Selanjutnya shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan alam Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam diatas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, baik dalam teknik penulisan maupun isi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran baik berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis agar tercapainya cita-cita.
2. Bapak Drs.Tarmizi Gadeng,SE,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar,SE,M.Si,Ak.CA. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Cut Fitrika Syawalina,SE,M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Zulkifli Umar,SE,M.Si,Ak.CA. Selaku pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yusliana,SE,M.Si. Selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh khususnya staf pengajar pada program studi akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata kepada Allah SWT kita berserah diri,karena segala sesuatu terjadi atas kehendakNya.

Banda Aceh, 01 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	6
2.1. Landasan Teoritis	6
2.1.1. Definisi Anggaran	6
2.1.2. Anggaran Sektor Publik	7
2.1.3. Tujuan Dan Manfaat Anggaran	8
2.1.4. Karakteristik Dan Siklus Anggaran	8
2.1.5. Prinsip Anggaran	10
2.1.6. Realisasi Anggaran	11
2.1.7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	12
2.1.8. Efisiensi	14
2.1.9. Efektivitas	16
2.1.10. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.2. Penelitian Sebelumnya	18
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Desain Penelitian	23
3.1.1. Tujuan Penelitian	23
3.1.2. Jenis Penelitian	23
3.1.3. Horizon Waktu Studi	24
3.1.4. Lokasi Dan Objek Penelitian	24
3.1.5. Unit Analisis	24
3.2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.3. Teknik Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
4.1.1. Sejarah Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh	28
4.1.2. Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh	29
4.1.3. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh	29
4.2. Hasil Penelitian.....	31
4.3. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020	33
4.3.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020	33
4.3.2. Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020	36
4.4. Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
5.1. Kesimpulan.....	42
5.2. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Tahun Anggaran 2017-2020	3
Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efisiensi	15
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas.....	17
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 3.1 Kriteria Rasio Efisiensi.....	26
Tabel 3.2 Kriteria Rasio Efektivitas.....	27
Tabel 4.1 Laporan Anggaran Belanja Langsung Dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017-2020	31
Tabel 4.2 Laporan Anggaran Belanja Dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017-2020.....	32
Tabel 4.3 Kriteria Rasio Efisiensi	34
Tabel 4.4 Rincian Rasio Efisiensi.....	36
Tabel 4.5 Kriteria Rasio Efektivitas	37
Tabel 4.6 Rincian Rasio Efektivitas.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Anggaran	9

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh.....	46
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017	47
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	53
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	60
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	70

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
BELANJA PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017-2020**

NAMIRA SALSABILLA
1802110134

Pembimbing: 1) Zulkifli Umar,SE,M.Si,Ak.CA
2) Yusliana,SE,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tingkat rasio efisiensi penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh pada tahun 2017 sebesar 84,95% dengan kriteria rasio cukup efisien, pada tahun 2018 sebesar 84,40% dengan kriteria rasio cukup efisien, pada tahun 2019 sebesar 77,15% dengan kriteria rasio efisien, pada tahun 2020 sebesar 62,98% dengan kriteria rasio efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh sudah berjalan efisien sesuai yang diharapkan. Dan tingkat rasio efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh pada tahun 2017 sebesar 94,79% dengan kriteria rasio efektif, pada tahun 2018 sebesar 85,34% dengan kriteria rasio cukup efektif, pada tahun 2019 sebesar 67,82% dengan kriteria rasio kurang efektif, pada tahun 2020 sebesar 77,15% dengan kriteria rasio kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh masih belum berjalan efektif seperti yang diharapkan.

Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas, Anggaran Belanja

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
BELANJA PADA DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017-2020**

NAMIRA SALSABILLA
1802110134

Advisor: 1) Zulkifli Umar,SE,M.Si,Ak.CA
2) Yusliana,SE,M.Si

ABSTRACT

This study aims to analyze the efficiency and effectiveness of the use of the budget at the Department of Animal Health and Husbandry Province of Aceh fiscal Year 2017-2020. The research method used is descriptive qualitative which describes the data that has been collected regarding the efficiency and effectiveness of the use of the budget at the Department of Animal Health and Livestock in Aceh Province. The results showed that the level ratio of the efficiency of the use of the budget at the Department of Animal Health and Husbandry Province of Aceh in 2017 amounted to 84,95% with the criteria of the ratio is quite efficient, in the year 2018 amounted to 84,40% with the criteria of the ratio is quite efficient, in the year of 2019 amounted to 77,15% with the criteria of the ratio of efficient, in the year 2020 by 62,98% with the criteria of the north efficient. This suggests that the use of the budget at the Department of Animal Health and Husbandry Province of Aceh has been running efficiently as expected. And the level of the ratio of the effectiveness of the use of the budget at the Department of Animal Health and Husbandry Province of Aceh in 2017 amounted to 94,79% with the criteria of the ratio of effective, in the year 2018 amounted to 85,34% with the criteria of the ratio of effective enough, in the year of 2019 amounted to 67,82% with the criteria of the ratio is less effective, in the year 2020 by 77,15% with the criteria of the ratio is less effective. This suggests that the use of the budget at the Department of Animal Health and Husbandry Province of Aceh is still not effective as expected.

Keywords: *Efficiency, Effectiveness, Budget Shopping*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pemerintah saat ini berorientasi pada kinerja (output) bukan pada biaya. Hasil tersebut harus terukur sesuai dengan visi dan misi satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Pemerintah harus memiliki rencana yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Maka rencana tersebut disusun dan dijadikan dalam bentuk anggaran. Karena anggaran pemerintah berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap aktivitas dan program dengan menggunakan dana milik masyarakat yang disetujui oleh legislatif untuk dibelanjakan.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka pemerintah dituntut untuk memberikan perhatian khusus agar terwujudnya pemerintah yang bersih. Salah satunya dengan memberikan akuntabilitas/pertanggungjawaban yang akurat, transparan, jelas serta menjamin terselenggaranya pemerintahan dengan pembangunan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah.

Setiap tahun pemerintah selalu mempersiapkan perencanaan anggaran atau disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Karena setiap daerah dituntut harus mampu untuk mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Rosmery Elsy (2016:2) “pengelolaan keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang

dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yakni pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabilitas dan transparansi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengeluaran daerah, maka pemerintah daerah harus Menyusun hasil laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah yang telah disusun secara umum. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja Lembaga/ organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran tersebut dapat berperan sebagai pengendali terhadap kegiatan pemerintah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah sistem yang digunakan harus diwujudkan dalam bentuk pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah setiap tahunnya. Penerimaan dan pengeluaran daerah harus dikelola sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilaporkan melalui laporan realisasi anggaran (LRA) pada setiap instansi pemerintahan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah mengenai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Pencapaian kinerja pemerintah secara efisien dan efektif bukanlah hal yang mudah, karena efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output dan input yang dihasilkan dan input yang digunakan. Proses kegiatan dikatakan efisien apabila suatu program atau kegiatan dilaksanakan dengan dana dan sumber daya yang seminimal mungkin.

Sedangkan, dalam hal efektivitas ukuran berhasil atau tidaknya suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan tidak hanya tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Tetapi untuk melihat apakah suatu program atau kegiatan sudah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) kurang dalam pemanfaatan jumlah anggaran yang telah dianggarkan. Sehingga hal itu mengakibatkan indikasi penggunaan anggaran belanja pada instansi tersebut tidak terealisasi 100% dan tidak mencapai target atau mengalami penurunan disetiap tahunnya. Hal ini akan berdampak pada anggaran tahun selanjutnya dengan berkurangnya anggaran dari tahun sebelumnya.

Berikut ini laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun 2017-2020

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan
Peternakan Provinsi Aceh Tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Selisih/ Sisa Anggaran	Capaian Realisasi (%)
2017	Rp 137.334.738.411	Rp 130.183.518.632	Rp 7.151.219.779	94,79 %
2018	Rp 148.920.586.375	Rp 127.083.083.970	Rp 21.837.502.405	85,34 %
2019	Rp 138.862.602.039	Rp 94.183.512.994	Rp 44.679.089.044	67,82 %
2020	Rp 75.782.073.566	Rp 58.464.860.151	Rp 17.317.213.415	77,15 %

Sumber: LRA Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh
(2017-2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Aceh terdapat sisa lebih anggaran setiap tahunnya yang belum terealisasi 100%. Pada tahun 2017-2019 sisa lebih anggaran cenderung terus meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2017 sisa lebih anggaran sebesar Rp 7.151.219.779 dengan capaian realisasi 94,79%, pada tahun 2018 sisa anggaran sebesar Rp 21.837.502.405 dengan capaian realisasi 85,34% dan pada tahun 2019 sisa lebih anggaran sebesar Rp 44.679.089.044 dengan capaian realisasinya 67,82%. Sedangkan pada tahun 2020 sisa lebih anggaran mengalami penurunan sebesar Rp 17.317.213.415 dengan capaian realisasi 77,15%.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh berjalan efisien pada tahun anggaran 2017-2020?
2. Apakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh berjalan efektif pada tahun anggaran 2017-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh berjalan efisien pada tahun anggaran 2017-2020.
2. Untuk menganalisis apakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh berjalan efektif pada tahun anggaran 2017-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan:

1. Secara praktis bagi instansi
Dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh agar berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
2. Secara teoritis
Dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini dan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan topik yang diteliti, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan judul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja

Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Definisi Anggaran

Anggaran (budget) merupakan alat pengawasan keuangan yang digunakan perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba agar aktivitas kegiatannya lebih terarah dan disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Menurut Didit Herlianto (2015:19) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana dari seluruh kegiatan perusahaan dalam unit kuantitatif, anggaran harus bersifat formal, artinya harus disusun secara sengaja dalam bentuk tertulis dan juga anggaran harus bersifat sistematis berdasarkan logika.

Menurut Halim dan Kusufi (2016:48) anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kerja baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode tertentu serta menyatakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Sedangkan menurut Purwanti dan Darsono (2013:111) anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka–angka keuangan dalam jangka waktu pendek dan jangka Panjang.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat ahli tersebut menyatakan bahwa anggaran adalah suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pernyataan Nomor 02

menyatakan bahwa anggaran adalah pedoman Tindakan yang dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun secara sistematis dengan jangka waktu untuk satu periode. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan rencana–rencana yang semaksimal mungkin yang nanti akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas negara. Maka pelaksanaannya, pemerintah keuangan negara atau daerah harus membuat penyusunan tersebut dalam bentuk anggaran.

2.1.2. Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (tahunan) yang berisi program atau kegiatan dengan jumlah anggaran yang diperoleh (penerimaan/ pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Menurut Bastian (2014:171) anggaran sektor publik adalah instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program dapat dibiayai dengan uang. Proses penganggaran organisasi sektor publik diawali dengan perumusan strategi dan perencanaan yang telah disusun, akan gagal apabila tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja.

Sedangkan menurut Mahmudi (2016:59) anggaran sektor publik merupakan organisasi tentang rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dimasa yang akan datang.

2.1.3. Tujuan Dan Manfaat Anggaran

Menurut Sasongko dan Parulian (2013:3) tujuan yang terkait dengan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi
Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian didalam perusahaan.
3. Motivasi
Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target tertentu yang harus dicapai perusahaan.
4. Pengendalian
Keberadaan anggaran memungkinkan manajemen dalam menjalankan fungsi pengendalian atas aktivitas/ program yang dilaksanakan perusahaan.

Menurut Nafarin (2013:19) anggaran mempunyai banyak manfaat diantaranya sebagai berikut:

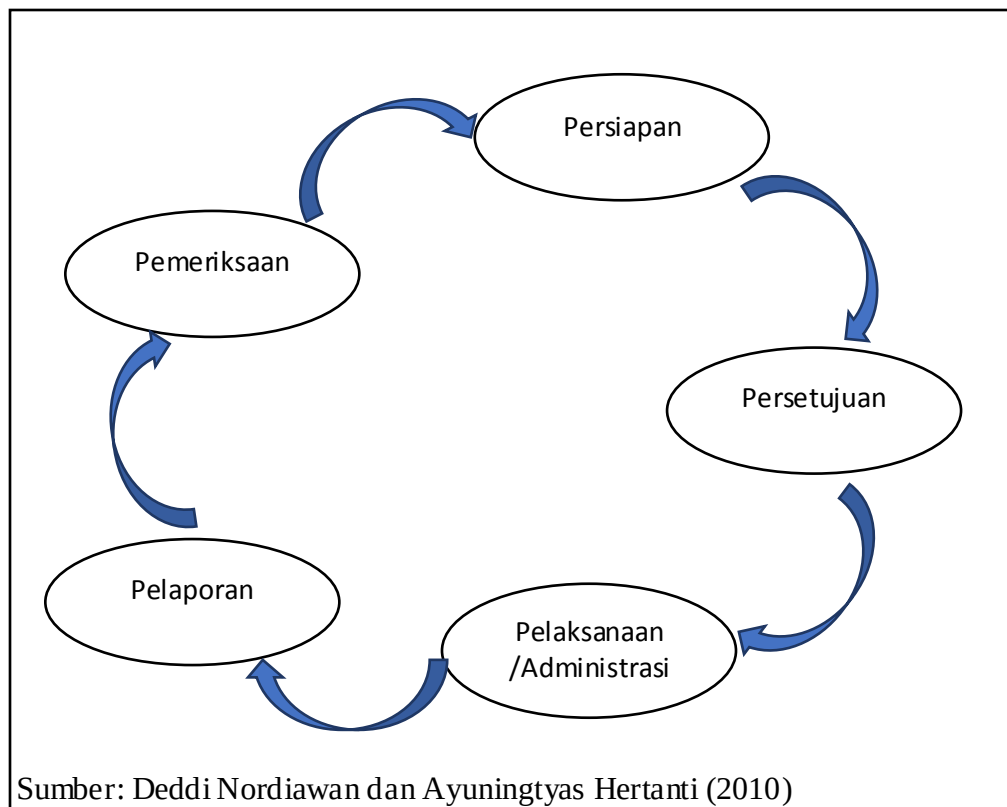
1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan Bersama.
2. Dapat dipergunakan sebagai alat penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan pegawai.
3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang tidak diperlukan.
6. Memanfaatkan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana secara efisien mungkin.

2.1.4. Karakteristik Dan Siklus Anggaran

Menurut Mulyadi (2013:490) bahwa karakteristik dari anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup waktu satu tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atas kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran.
4. Usulan anggaran yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
6. Kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertanti (2010:72) siklus dalam anggaran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Siklus Anggaran

Pada gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa siklus anggaran dimulai dengan tahap persiapan yaitu menyiapkan format anggaran yang akan dipakai, setiap unit pemerintahan mengajukan anggaran selanjutnya yang akan dikonsolidasi terlebih dahulu oleh bagian anggaran. Setelah itu di review dan diadakan dengar pendapat ke semua unit, dan anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.

Kemudian, tahap berikutnya adalah persetujuan Lembaga legislatif, dalam hal ini Lembaga legislatif (komite anggaran) akan mengadakan pembahasan untuk

memperoleh pertimbangan–pertimbangan dan juga dengar pendapat sebelum Lembaga legislatif menyetujui atau menolak anggaran tersebut.

Setelah anggaran disahkan atau disetujui, selanjutnya pelaksanaan anggaran dimulai baik dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan dan dilakukan proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang berlangsung. Kemudian dilakukannya pelaporan pada akhir periode waktu tertentu ditetapkan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses akuntansi yang berlangsung.

Untuk tahap terakhir, laporan yang diberikan akan diperiksa (di audit) oleh Lembaga pemeriksa. Dan hasil pemeriksa akan menjadi masukan (*feedback*) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

2.1.5. Prinsip Anggaran

Menurut Mardiasmo (2011:67) mengemukakan bahwa prinsip–prinsip dalam penyusunan anggaran, sebagai berikut:

1. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran harus terlebih dahulu mendapatkan otorisasi dari pihak legislatif sebelum eksekutif membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif
Harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah.
3. Keutuhan anggaran
Semua pengeluaran dan pemasukan pemerintah tercakup dalam dana umum.
4. *Nondiscretionary appropriation*
Jumlah anggaran yang disetujui oleh pihak legislatif tidak bisa serta merta bebas digunakan tetapi harus dimanfaatkan penggunaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis.
5. Periodik
Proses anggaran yang berlangsung secara periodik dan bersifat tahunan atau multi tahunan.
6. Akurat
Tidak memasukkan cadangan anggaran yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan anggaran.

7. Jelas

Anggaran mudah dipahami sederhana dan tidak membingungkan.

8. Transparan

Tidak tertutup untuk publik tetapi harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.6. Realisasi Anggaran

Menurut Erlina Rosdianto (2013:23) laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding untuk periode tertentu. Penyandingan anggaran realisasi menunjukkan tingkat pencapaian target–target yang telah disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang–undangan.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat/ daerah, serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh telah digunakan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis sesuai dengan perundang–undangan dan disajikan dalam perhitungan APBN/ APBD.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 Tahun 2005, tujuan laporan realisasi anggaran adalah:

1. Kebijakan LRA untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi mengenai realisasi dan anggaran secara tersanding ditingkat SKPD/ OPD, PPKD dan pemda. Penyanding antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian dalam target yang telah disepakati oleh pihak legislatif dan eksekutif.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 2 Tahun 2005, manfaat dari laporan realisasi anggaran adalah untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Unsur dari laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA
Penerimaan oleh bendahara umum negara/ bendahara umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar Kembali oleh pemerintah.
2. Belanja
Semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/ daerah yang mrngurangi saldo anggaran lebih periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah.
3. Transfer
Penerimaan dan pengeluaran uang/ anggaran oleh suatu entitas pelaporan kepada pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*)
Setiap penerimaan dan pengeluaran yang tidak berpengaruh kepada kekayaan bersih entitas dan perlu dibayar Kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman, hasil investasi Kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.1.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Sedangkan menurut Dr. Rudy Badruddin (2015:60) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan/ penerimaan dan belanja/ pengeluaran pemerintah daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. Dan menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:21) berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah “APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan berbagai proyek daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran–pengeluaran yang dimaksud”.

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah meliputi:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah meliputi:

1. Belanja langsung
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja modal
2. Belanja tidak langsung

Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

 - a. Belanja pegawai
 - b. Bunga
 - c. Subsidi
 - d. Hibah
 - e. Bantuan sosial
 - f. Belanja bagi hasil
 - g. Bantuan keuangan
 - h. Belanja tak terduga

2.1.8.Efisiensi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) efisiensi adalah ketepatan dalam melakukan sesuatu dan kemampuan dalam melakukan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. Menurut Mahmudi (2019:85) efisiensi adalah perbandingan antara output dan input dengan kata lain output perunit input. Suatu organisasi, program, dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output dengan input seminim mungkin atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output semaksimal mungkin. Sedangkan menurut Abdul dan Muhammad (2019:163) mengemukakan bahwa efisiensi yaitu

rasio yang membandingkan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ahli disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu rasio perhitungan perbandingan antara output dan input yang seminim mungkin. Semakin kecil rasio maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nordiawan (2011:161) bahwa dalam organisasi sektor publik dikatakan efisien apabila semakin besar rasio maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Sedangkan menurut Yulianti (2015:3) kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila semakin kecil tingkat rasio nya maka semakin baik tingkat efisiensinya.

Pada suatu proses kegiatan operasional bisa dikatakan efisien apabila hasil kerja yang dicapai dengan menggunakan sumber dana yang seminimal mungkin. Untuk mengukur tingkat efisiensi suatu instansi pemerintah maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}{Realisasi Anggaran Belanja} \times 100\%$$

Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900–327 Tahun 1996. Kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Efisiensi

No.	Persentase Anggaran	Kriteria
1	>100 %	Tidak efisien

2	90 % - 100 %	Kurang efisien
3	80 % - 90 %	Cukup efisien
4	60 % - 80 %	Efisien
5	< 60 %	Sangat efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900–327 Tahun 1996

2.1.9. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Abdul dan Iqbal (2019:63) efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Menurut Mahmudi (2019:86) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran antara output dengan tujuan. Apabila semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Dalam suatu organisasi, program/kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau disebut *spending wisely*.

Sedangkan, Menurut Beni (2016:69) efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari suatu organisasi atau program /kegiatan.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat ahli, disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk mengukur tingkat efektivitas suatu instansi pemerintah maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Target\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900–327 Tahun 1996. Kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efektivitas

No	Persentase Anggaran	Kriteria
1	>100 %	Sangat efektif
2	90 % - 100 %	Efektif
3	80 % - 90 %	Cukup efektif
4	60 % - 80 %	Kurang efektif
5	< 60 %	Tidak efektif

Sumber: keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900–327 Tahun 1996

2.1.10. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa terdapat tujuh komponen laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, lokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode

pelaporan. Unsur yang mencakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 3) Neraca
Yaitu laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk suatu entitas pada saat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 4) Laporan Operasional (LO)
Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang mencakup dalam laporan operasional terdiri dari beban, transfer dan pos-pos luar biasa.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Novia Dhiniharista (2019) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman. Menyatakan bahwa periode

anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2016-2018) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung hasil dari analisisnya secara keseluruhan cukup efektif. Program yang direncanakan telah direalisasikan dengan cukup baik. Sedangkan tingkat efisiensi keseluruhan realisasi anggaran belanja langsung setelah dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tingkatan efisien, telah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Salmah Pattisahusiwa (2018) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Samarinda Periode 2011-2015. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada pemerintah kota samarinda dari tahun 2011-2015 beragam. Pada tahun 2014 masuk dalam kriteria kurang efektif, karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Sehingga beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terealisasi secara efektif. Dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah kota samarinda tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012-2015 dikategorikan efisien.

Menurut Siti Basariyah (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada BPMD tahun 2011-2015 secara keseluruhan terlaksana

secara efektivitas. Rasio efisiensi yang dihasilkan dari penelitian rata-rata menunjukkan pelaksanaan anggaran cukup efisien.

Menurut Imanuel Pangkey (2015) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas keseluruhannya tidak efektif dan untuk tingkat efisiensinya juga tidak efisien.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Penelitian/ Nama/ Tahun	Motode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman, (Novia Dhiniharista, 2019).	Penelitian deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa periode anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2016-2018) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung hasil dari analisisnya secara keseluruhan cukup efektif. Program yang direncanakan telah direalisasikan dengan cukup	Efektivitas efisiensi dan pengelolaan keuangan	Lokasi penelitian, waktu penelitian dan tahun penelitian

			baik. Sedangkan tingkat efisiensi keseluruhan realisasi anggaran belanja langsung setelah dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tingkatan efisien, telah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.		
--	--	--	--	--	--

No.	Judul Penelitian/ Nama/ Tahun	Motode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Samarinda Periode Tahun 2011-2015 (Salmah Pattisahusiwa, 2018).	Penelitian deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada pemerintah kota samarinda dari tahun 2011-2015 beragam. Pada tahun 2014 masuk dalam kriteria kurang efektif, karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Sehingga beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terealisasi secara efektif.	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan	Waktu penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian

			Dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah kota samarinda tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012-2015 dikategorikan efisien.		
--	--	--	---	--	--

Tabel 2.3 Lanjutan

No.	Judul Penelitian/ Nama/ Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Siti Basariya,2017).	Penelitian deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada BPMD tahun 2011-2015 secara keseluruhan terlaksana secara efektivitas. Rasio efisiensi yang dihasilkan dari penelitian rata-rata menunjukkan pelaksanaan anggaran cukup efisien.	Rasio efektivitas dan rasio efisiensi.	Lokasi penelitian, waktu penelitian dan tahun penelitian.
4.	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada	Metode analisis deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas	Rasio efektivitas dan rasio efisiensi	Lokasi, waktu penelitian dan tahun penelitian.

	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara (Imanuel Pangkey Dan Pinatik,2015)		keseluruhannya tidak efektif dan untuk tingkat efisiensinnya juga tidak efisien.		
--	---	--	--	--	--

Tabel 2.3 Lanjutan

Sumber: Data diolah (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Suryabrata (2012 hal:80) penelitian studi kasus merupakan studi yang mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan gambaran luas serta mendalam. Untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial seperti individu, Lembaga atau masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan atau menolak hipotesa/teori yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara numerik.

3.1.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan sudah berjalan efisien dan efektif.

3.1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2012:11) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.1.3. Horizon Waktu Studi

Penelitian ini menggunakan One Shot Study yaitu data yang dikumpulkan secara sekaligus dapat berupa data dari satu subjek atau beberapa subjek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode.

3.1.4. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh yang berlokasi di jalan Mr. Muhammad Hasan No. 147 Banda Aceh. Yang menjadi objek penelitian penulis yaitu efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh. Sedangkan responden yang menjadi sumber datanya dan informasi yaitu pejabat dan pegawai bagian keuangan.

3.1.5. Unit Analisis

Penelitian ini melakukan pengujian terhadap analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja dengan metode wawancara dan observasi yaitu melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Slat (2013:48) data dikelompokkan sebagai berikut:

1. Data primer

Data yang diperoleh dari survey lapangan yang menggunakan kuesioner dan pengumpulan data original.

2. Data sekunder

Data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada pengguna data tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah dengan merumuskan Teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, dalam studi lapangan ini digunakan 2 cara yaitu sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh bagian keuangan untuk memperoleh informasi dan data mengenai Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2020.

2. Metode dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melihat data-data yang berkenaan dengan anggaran belanja yang telah disusun dan tersimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yaitu Laporan Realisasi Anggaran Tahun

2017-2020 yang sudah disediakan oleh pihak Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif, dengan menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan dengan permasalahan yang ditimbulkan di lapangan kemudian dilakukan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode deskriptif dengan rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

1. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan Realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan Realisasi Anggaran Belanja.

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Kriteria Rasio Efisiensi

No.	Persentase Anggaran	Kriteria
1	>100 %	Tidak efisien
2	90 % - 100 %	Kurang efisien
3	80 % - 90 %	Cukup efisien
4	60 % - 80 %	Efisien
5	< 60 %	Sangat efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900-327 Tahun 1996

2. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan Realisasi Anggaran Belanja dengan Target Anggaran Belanja.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Target\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Efektivitas

No	Persentase Anggaran	Krite ria
1	>100 %	Sangat efektif
2	90 % - 100 %	Efektif
3	80 % - 90 %	Cukup efektif
4	60 % - 80 %	Kurang efektif
5	< 60 %	Tidak efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900–327 Tahun 1996

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Aceh

Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh adalah perangkat daerah, sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh dibidang peternakan. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara hirarkhi berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk itu pada tanggal 29 Desember 2016 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh.

Perangkat daerah ini mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/ pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan Kesehatan produk ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) di Aceh. Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh selain berstatus perangkat daerah, juga masih memiliki hubungan vertikal dengan pemerintah pusat melalui kementerian pertanian, sehingga program dan kebijakannya juga mengacu kepada rencana kerja istimewa (RKI) dari pemerintah pusat.

Dalam pembiayaan program/ kegiatan dan rencana anggaran pembangunan peternakan di Aceh bersumber dari APBN maupun APBD termasuk yang dibiayai dengan sumber dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Pembangunan peternakan daerah Aceh merupakan salah satu sektor penting

dalam pembangunan ekonomi Aceh. Selama kurun waktu 2017-2022 pembangunan peternakan diarahkan pada upaya-upaya revitalisasi pembangunan peternakan dalam rangka mereposisi Kembali kedudukan dan peran penting peternakan secara proporsional dalam kontek pembangunan daerah dan pembangunan pertanian nasional.

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Aceh

Adapun Visi dan Misi Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Aceh yaitu:

a. Visi

“Menjamin terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan dari sektor peternakan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan peternak melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil peternakan”.

b. Misi

1. Meningkatkan produktifitas daging dan telur serta kemudahan aksesnya.
2. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambahan terhadap produk peternakan.
3. Menjamin produk peternakan yang ASUH.
4. Meningkatkan kesejahteraan peternakan yang tangguh dan berkelanjutan.

4.1.3. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Aceh

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Aceh. Lembaga teknis dan Lembaga daerah provinsi aceh terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perbibitan Dan Produksi Ternak
4. Bidang Pakan
5. Bidang Kesehatan Hewan Dan Veteriner
6. Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, Lembaga teknis daerah dan Lembaga daerah provinsi Aceh, dipandang perlu menata kembali susunan organisasi dan tata kerja UPTD pada dinas peternakan, untuk itu pada tanggal 29 Desember 2016 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Aceh. Dalam Peraturan Gubernur tersebut, susunan organisasi dan tata kerja UPTD terdiri dari:

1. UPTD Laboratorium Veteriner
 2. UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI)
 3. UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR)
- a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program, Informasi Dan Hubungan Masyarakat
 2. Sub Bagian Keuangan Dan Pengelolaan Aset
 3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian Dan Umum
 - b. Bidang Perbibitan Dan Produksi Ternak
 1. Seksi Standarisasi Dan Mutu Ternak
 2. Seksi Ruminansia Potong
 3. Seksi Inseminasi Buatan
 - c. Bidang Pakan
 1. Seksi Bahan Pakan
 2. Seksi Pakan Hijauan Dan Pakan Olahan
 3. Seksi Mutu, Keamanan Dan Pendaftaran Pakan
 - d. Bidang Kesehatan Hewan Dan Veteriner
 1. Seksi Pengamatan Penyakit
 2. Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 3. Seksi Perlindungan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - e. Bidang Usaha, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan
 1. Seksi Pengolahan
 2. Seksi Investasi Dan Pengembangan Usaha
 3. Seksi Pemasaran
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. UPTD Laboratorium Veteriner
 - 1) Subbag Tata Usaha
 - 2) Seksi Laboratorium Kesmavet
 2. UPTD Inseminasi Buatan Dan Inkubator
 - 1) Subbag Tata Usaha
 - 2) Seksi Pemeliharaan Ternak Dan Produksi Semen Beku
 - 3) Seksi Inkubator Peternakan

3. UPTD Balai Ternak Non Ruminansia

- 1) Subbag Tata Usaha
- 2) Seksi Produksi Dan Pengolahan Ternak Non Ruminansia
- 3) Seksi Pakan Ternak Non Ruminansia

4.2. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh, maka data yang di peroleh berupa data anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tahun 2017-2020. Berikut ini laporan anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja langsung, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Laporan Anggaran Belanja Langsung Dan Realisasi Anggaran Belanja
Langsung Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Sisa Anggaran	Capaian Realisasi (%)
2017	Rp 116.545.812.919	Rp 110.602.889.259	Rp 5.942.923.660	94,90%
2018	Rp 128.242.547.656	Rp 107.268.254.542	Rp 20.974.293.114	83,64%
2019	Rp 116.632.360.031	Rp 72.663.612.795	Rp 43.968.747.235	62,30%
2020	Rp 45.807.427.356	Rp 36.821.334.745	Rp 8.986.092.611	80,38%

Sumber: Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh (2017-2020)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat terlihat jelas bahwa anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh mengalami penurunan disetiap tahunnya, begitu juga dengan sisa anggaran dan capaian realisasinya juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017 anggaran belanja langsung sebesar Rp 116.545.812.919, realisasinya sebesar Rp 110.602.889.259 dan sisa anggaran sebesar Rp 5.942.923.660 dengan capaian realisasinya 94,90%. Pada tahun 2018 anggaran belanja langsung sebesar

Rp 128.242.547.656, realisasinya sebesar Rp 107.268.254.542 dan sisa anggaran sebesar Rp 20.974.293.114 dengan capaian realisasinya 83,64%. Pada tahun 2019 anggaran belanja langsung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 116.632.360.031, realisasinya sebesar Rp 72.663.612.795 dan sisa anggaran sebesar Rp 43.968.747.235 dengan capaian realisasinya 62,30%. Pada tahun 2020 anggaran belanja langsung juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 45.807.427.356, realisasinya sebesar Rp 36.821.334.745 dan sisa anggaran sebesar Rp 8.986.092.611 dengan capaian realisasi 80,38%.

Adapun laporan anggaran belanja dan laporan realisasi anggaran Belanja sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Anggaran Belanja Dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Sisa Anggaran	Capaian Realisasi (%)
2017	Rp 137.334.738.411	Rp 130.183.518.632	Rp 7.151.219.779	94,79 %
2018	Rp 148.920.586.375	Rp 127.083.083.970	Rp 21.837.502.405	85,34 %
2019	Rp 138.862.602.039	Rp 94.183.512.994	Rp 44.679.089.044	67,82 %
2020	Rp 75.782.073.566	Rp 58.464.860.151	Rp 17.317.213.415	77,15 %

Sumber: Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh (2017-2020)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat terlihat jelas bahwa total realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 anggaran belanja sebesar Rp 137.334.738.411, realisasinya sebesar Rp 130.183.518.632 dan sisa anggaran sebesar Rp 7.151.219.779 dengan capaian realisasinya 94,79 %. Pada tahun 2018 anggaran belanja sebesar Rp 148.920.586.375, realisasinya sebesar Rp

127.083.083.970 dan sisa anggaran sebesar Rp 21.837.502.405 dengan capaian realisasinya 85,34 %. Pada tahun 2019 anggaran belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 138.862.602.039, realisasinya sebesar Rp 94.183.512.994 dan sisa anggaran sebesar Rp 44.679.089.044 dengan capaian realisasinya 67,82 %. Sedangkan pada tahun 2020 anggaran belanja juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 75.782.073.566, realisasinya sebesar Rp 58.464.860.151 dan sisa anggaran sebesar Rp 17.317.213.415 dengan capaian realisasinya 77,15 %.

4.3. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020

4.3.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020

Menurut Mahmudi (2019:85) efisiensi adalah perbandingan antara output dan input dengan kata lain output perunit input. Dalam suatu organisasi, program, dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output seminim mungkin atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output semaksimal mungkin. Semakin kecil rasio maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900–327 Tahun 1996. Kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Kriteria Rasio Efisiensi

No.	Persentase Anggaran	Kriteria
1	>100 %	Tidak efisien
2	90 % - 100 %	Kurang efisien
3	80 % - 90 %	Cukup efisien
4	60 % - 80 %	Efisien
5	< 60 %	Sangat efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900–327 Tahun 1996

Berdasarkan hasil observasi laporan anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020, maka perhitungan rasio tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2017

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{110.602.889.259}{130.183.518.632} \times 100\% \\
 &= 0,8495 \\
 &= 84,95\%
 \end{aligned}$$

Jadi, nilai 84,95% termasuk dalam Tabel 4.3 dengan kriteria rasio cukup efisien.

2. Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2018

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{107.268.254.542}{127.083.083.970} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= 0,8440$$

$$= 84,40\%$$

Jadi, nilai 84,40% termasuk dalam Tabel 4.3 dengan kriteria rasio cukup efisien.

3. Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2019

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{72.663.612.795}{94.183.512.994} \times 100\%$$

$$= 0,7715$$

$$= 77,15\%$$

Jadi, nilai 77,15% termasuk dalam Tabel 4.3 dengan kriteria rasio efisien.

4. Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2020

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{36.821.334.745}{58.464.860.151} \times 100\%$$

$$= 0,6298$$

$$= 62,98\%$$

Jadi, nilai 62,98% termasuk dalam Tabel 4.3 dengan kriteria rasio efisien.

Dengan demikian untuk lebih jelas bisa dilihat rincian rasio efisiensi pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Rincian Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi (%)	Krite ria Rasio
2017	Rp 110.602.889.259	Rp 130.183.518.632	84,95%	Cukup efisien
2018	Rp 107.268.254.542	Rp 127.083.083.970	84,40%	Cukup efisien
2019	Rp 72.663.612.795	Rp 94.183.512.994	77,15%	Efisien
2020	Rp 36.821.334.745	Rp 58.464.860.151	62,98%	Efisien

Sumber: Data diolah (2021)

Analisis efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu program atau kegiatan. Pada tahun 2017-2018 tingkat rasio efisiensi anggaran belanja Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh berada pada kriteria cukup efisien dengan masing-masing rasio sebesar 84,95% dan 84,40%. Sedangkan pada tahun 2019-2020 tingkat rasio efisiensi berada pada kriteria efisien dengan masing-masing rasio sebesar 77,15% dan 62,98%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh sudah berjalan efisien sesuai yang diharapkan.

4.3.2. Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020

Menurut Mahmudi (2019:86) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran antara output dengan tujuan. Apabila semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,

program atau kegiatan tersebut. Dalam suatu organisasi, program/ kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau disebut *spending wisely*.

Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900–327 Tahun 1996. Kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Kriteria Rasio Efektivitas

No	Persentase Anggaran	Krite ria
1	>100 %	Sangat efektif
2	90 % - 100 %	Efektif
3	80 % - 90 %	Cukup efektif
4	60 % - 80 %	Kurang efektif
5	< 60 %	Tidak efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900–327 Tahun 1996

Berdasarkan hasil observasi laporan anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggarn 2017-2020, maka perhitungan rasio tingkat efektivitas sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2017

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{130.183.518.632}{137.334.738.411} \times 100\% \\
 &= 0,94,79 \\
 &= 94,79\%
 \end{aligned}$$

Jadi, nilai 94,79% termasuk dalam Tabel 4.5 dengan kriteria rasio efektif.

2. Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2018

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{127.083.083.970}{148.920.586.375} \times 100\% \\ &= 0,85336 \\ &= 85,34\%\end{aligned}$$

Jadi, nilai 85,34% termasuk dalam Tabel 4.5 dengan kriteria rasio cukup efektif

3. Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2019

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{94.183.512.994}{138.862.602.039} \times 100\% \\ &= 0,6782 \\ &= 67,82\%\end{aligned}$$

Jadi, nilai 67,82% termasuk dalam Tabel 4.5 dengan kriteria rasio kurang efektif.

4. Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2020

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{58.464.860.151}{75.782.073.566} \times 100\% \\ &= 0,77148\end{aligned}$$

$$= 77,15\%$$

Jadi, nilai 77,15% termasuk dalam Tabel 4.5 dengan kriteria rasio kurang efektif.

Dengan demikian untuk lebih jelas bisa dilihat rincian rasio efisiensi pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Rincian Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Rasio
2017	Rp 137.334.738.411	Rp 130.183.518.632	94,79%	Efektif
2018	Rp 148.920.586.375	Rp 127.083.083.970	85,34%	Cukup Efektif
2019	Rp 138.862.602.039	Rp 94.183.512.994	67,82%	Kurang Efektif
2020	Rp 75.782.073.566	Rp 58.464.860.151	77,15%	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Analisis efektivitas anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penggunaan anggaran dalam suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2017 tingkat rasio efektivitas anggaran belanja berada pada kriteria efektif dengan rasio 94,79%. Pada tahun 2018 tingkat rasio efektivitas anggaran belanja berada pada kriteria cukup efektif dengan rasio sebesar 85,34%. Sedangkan pada tahun 2019-2020 tingkat rasio efektivitas anggaran belanja berada pada kriteria kurang efektif dengan masing-masing rasio sebesar 67,82% dan 77,15%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran

belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh masih belum berjalan efektif seperti yang diharapkan.

4.4. Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020

Hasil dari observasi laporan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020. Maka efisiensi penggunaan anggaran belanja tahun 2017-2020 sangat bervariasi. Pada tahun 2017-2018 berada pada kriteria cukup efisien. Sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan kriteria menjadi efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020 sudah berhasil meningkatkan kinerjanya dalam penggunaan anggaran belanja secara efisien. Yuliati (2015:3) mengemukakan bahwa kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila semakin kecil tingkat rasio nya maka semakin baik tingkat efisiensinya.

Hasil dari observasi laporan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020. Maka efektivitas penggunaan anggaran juga bervariasi. Pada tahun 2017 berada pada kriteria efektif. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kriteria menjadi cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan kriteria menjadi kurang efektif, karena penggunaan anggaran belanja tidak terealisasi

dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020 belum berhasil dalam penggunaan anggaran belanja secara efektif. Menurut Mahmudi (2019:86) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran antara output dengan tujuan. Apabila semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Dalam suatu organisasi, program/ kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau disebut *spending wisely*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020 sangat bervariasi. Pada tahun 2017-2018 penggunaan anggaran berada pada kriteria cukup efisien dengan nilai masing-masing yaitu tahun 2017 sebesar 84,95% dan tahun 2018 sebesar 84,40%. Sedangkan pada tahun 2019-2020 penggunaan anggaran belanja berada pada kriteria efisien dengan nilai masing-masing yaitu tahun 2019 sebesar 77,15% dan tahun 2020 sebesar 62,98%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh sudah berjalan efisien sesuai yang diharapkan.
2. Efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020 juga bervariasi. Pada tahun 2017 penggunaan anggaran belanja berada pada kriteria efektif dengan nilai 94,79%. Pada tahun 2018 penggunaan anggaran belanja berada pada kriteria cukup efektif dengan nilai 85,34%. Sedangkan pada tahun 2019-2020 penggunaan anggaran belanja mengalami penurunan kriteria menjadi kurang efektif dengan nilai masing-masing yaitu tahun 2019 sebesar 67,82% dan tahun 2020 sebesar 77,15%. Hal ini menunjukkan

bahwa penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh masih belum berjalan efektif seperti yang diharapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017-2020 maka perlu dilakukan perencanaan penggunaan anggaran belanja dengan baik, sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran.
2. Diharapkan efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja dapat ditingkatkan sehingga anggaran yang ditargetkan dapat terealisasi dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Dan Iqbal. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Basariyah, S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*. Vol.5 No.6 Juni 2017, Hlm. 63-74.
- Beni. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Jayapura: Taushia.
- Dhiniharitsa, N. (2019). Kajian Metode Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Yogyakarta*.
- Elsye, Rosemary, (2016). *Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*, Bogor: Graha Indonesia.
- Erlina, Rosdianto, (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Medan: Brama Ardian.
- Herlianto, Didit (2015) *Anggaran Keuangan*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900–327 Tahun 1996 tentang *Kriteria tingkat efisiensi*.
- Mahmudi, (2016) *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YPKN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Keuangan*. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi (2013). *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi (2016) *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narafin. (2013) *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

- Nordiawan, Deddi Dan Hertianti Ayuningtyas (2010). *Akuntansi Sektor Publik* Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.7 No.3 Juli 2019, Hlm. 2979-2988.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hlm. 33-34.
- Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2006 Tentang *Belanja Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2011 Tentang *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rampengan, M. (2016). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 No.3 2016.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Samarinda Periode Tahun 2011-2015. *Jurnal Kinerja*. Vol.15 No.1, Hlm. 38-43.
- Sasongko Dan Parulian (2013). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Slat (2013:48). Analisis Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Dan Penentuan Harga Jual. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 Juni 2013, ISSN 2303-1174.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.1 No.3 September 2013, Hlm.74-81.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Pasal 64 Ayat 2 Tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*.

